TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI PEDESAAN

Tubagus Hasanuddin dan Dwi Muhammad

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

ABSTRACT

The objective of this research were : (1) The Effectiveness of Rural Agribusiness Development Programe (PUAP) in farmers society, 2) the factors related to effectiveness PUAP Programe, and 3) The impact of PUAP program to social, economic, environment, and empowerment farmers society.

This research was conducted from September - December 2011 in Sukadana Village, Sukadana District, East Lampung. The samples of this research consisted of 56 from 125 farmers who involve in PUAP programe and used proporsional stratified random sampling. The data collection method was Survey, Depth Interview, and Focus Group Discussion. The data analysis were used desciptive analysis and statistic non parametric Rank Spearman correlation test.

The results research showed that : (1) The Effectiveness Rural Agribusiness Development Program has enough effective, (2) The Farmers PUAP Programe knowledge , mentoring activities, and farmers of participation has very significant influence to effectivenees PUAP program, but the management of funds, government support, and types of farmer agribusiness has significant, and (3) The social impact of PUAP program were the increasing of social interaction, solidarity, motivation, and responsibility of farmers. The economic impact of PUAP Program were the increased activity of farmers agribusiness, income, and the welfare of farmers. The environmental impact of PUAP programe were improvement of facilities and infrastructure, land use for agribusiness, and farmers empowerment.

Key Words : Rural Agribusiness Development Program (PUAP), income, empowerment, farmer.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Masalah

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting karena sebagian besar penduduknya (lebih dari 50 %) menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan *(people centered development)*. Model pembangunan demikian merupakan arah baru pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menuju masyarakat tani yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan (Sumodiningrat, 2001).

Tingkat kesejahteraan masyarakat petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara berkembang di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya (Husodo, 2009). Tingginya jumlah petani miskin di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia disebabkan oleh rendahnya produktivitas dari petani itu sendiri. Rendahnya produktivitas petani ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, akses permodalan, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, dan rendahnya kesehatan (Kartasasmita, 1997).

Program-program pengentasan kemiskinan yang pernah dilaksanakan pemerintah diantaranya yaitu bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani seperti program BIMAS (tahun 1964) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam usahatani dan peningkatan produksi pangan secara nasional. Pada tahun 1985 Program BIMAS dan kelembagaan kredit petani mengalami banyak perubahan dan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan dan diganti dengan Program Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dari sistem kredit massal BIMAS (Mubyarto, 1989). Perkembangan bentuk program bantuan penguatan modal dari pemerintah lainnya adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP) pada tahun 2000 yang merupakan bentuk fasilitasi modal untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani. Tahun 2001 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Salah satu program pemerintah dalam upaya mengembangkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat perdesaan yang saat ini sedang berjalan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM-MP merupakan program pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kementerian Dalam Negeri.

PNPM-MP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengganguran yang difokuskan pada program penangulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat. Program yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat petani di perdesaan yang sekarang masih berlangsung yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2008 dan dilakukan secara terintegrasi dengan PNPM-Mandiri Perdesaan. Program PUAP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) dilakukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun, bukan berarti bahwa dana tersebut ditujukan untuk gapoktan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan organisasi gapoktan. Dana tersebut harus disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan rumah tangga sasaran program PUAP. Gapoktan hanya berperan sebagai pengelola dana BLM-PUAP yaitu sebagai penyalur dana tersebut kepada RTM dan mengendalikan pemanfaatannya yaitu usaha agribisnis.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, dimana perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Beberapa program pengentasan kemiskinan di Propinsi Lampung antara lain Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Tujuan utama program tersebut yaitu untuk mencapai struktur perekonomian yang kuat dan seimbang, baik bidang pertanian maupun non pertanian. Kenyataan di lapangan bahwa program-program pemerintah tersebut belum menuntaskan permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung karena sampai dengan saat ini masih banyak penduduk miskin yang dijumpai di propinsi ini yang merupakan propinsi termiskin kedua di Pulau Sumatra setelah Nangroe Aceh Darrusalam. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase
Lampung Barat	419.037	79.500	19,0
Tanggamus	901.982	174.900	19,4
Lampung Selatan	912.490	222.500	24,3
Lampung Timur	**951.639**	**206.300**	**21,7**
Lampung Tengah	1.170.717	230.700	19,7
Lampung Utara	584.277	171.000	29,3
Way Kanan	406.123	79.200	19,5
Tulang Bawang	836.020	86.800	10,3
Pesawaran	398.848	100.900	25,3
Bandar Lampung	881.801	123.900	14,1
Metro	145.471	21.200	14,6
Jumlah	**7.608.405**	**1.496.900**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2010

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung masih cukup tinggi. Dipihak lain, karena sebagian besar penduduk Propinsi Lampung bermata pencaharian sebagai petani, maka kemiskinan petani di propinsi ini sangat mudah dijumpai. Untuk mengatasi kemiskinan petani di atas, maka sejak tahun 2008 di Propinsi Lampung dilaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yaitu melibatkan 269 Desa/Gapoktan pada tahun 2008, 233 Desa/Gapoktan pada tahun 2009, dan 263 Desa/Gapoktan pada tahun 2010. Namun demikian berdasarkan pengamatan di lapangan tampak bahwa pelaksanaan program PUAP belum berkembang dengan baik seperti yang diharapkan bahkan pada beberapa kasus dijumpai adanya kecemburuan petani terhadap penyaluran dana ini. Oleh karena itu penelitian terhadap pelaksanaan program PUAP pada masyarakat petani dalam rangka mencapai tujuannya perlu dilakukan. Apakah program PUAP telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat petani? Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program PUAP tersebut? Bagaimanakah keragaan program PUAP itu sendiri dalam pelaksanaannya di lapangan? Apakah program PUAP ini dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat petani di pedesaan? Dampak-dampak apakah yang telah ditimbulkan oleh program PUAP terhadap kehidupan masyarakat petani di pedesaan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Keragaan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di pedesaan, (2) Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan program PUAP di pedesaan, dan (3) Dampak program PUAP terhadap peningkatan pendapatan dan keberdayaan masyarakat petani di pedesaan.

B. LANDASAN TEORI

1. Petani dan Kemiskinan

Petani adalah orang yang bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan dan lainnya pada suatu lahan. Masyarakat petani adalah masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian dan menjadikan sektor ini sebagai sumber utama pendapatan petani. Karakteristik fundamental masyarakat petani adalah perekonomiannya merupakan perekonomian keluarga yaitu seluruh kegiatan ditentukan oleh ukuran dan komposisi keluarga petani dan kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga. Kepala keluarga bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas dari rumah tangganya, sedangkan anggota keluarga atau rumah tangga adalah mereka yang hidup dalam satu atap dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga yang bersangkutan (Wolf, 1985). Menurut Hernanto (1991), petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupannya dalam bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanaman, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil hutan.

Menurut Sumodiningrat (2001), pengertian petani sebagai pelaku pembangunan pertanian dapat dilihat dalam cakupan yang luas. Pertama, berdasarkan penguasaan atas sumberdaya ekonomi pertanian terdapat 1) petani yang bertindak sebagai pemilik lahan, 2) petani yang menyewa atau penyakap, 3) petani gurem atau buruh tani. Kedua, berdasarkan komunitas pertanian meliputi 1) petani individu, 2) keluarga petani, 3) kelompok usaha tani, 4) desa pertanian. Berbagai aktivitas masyarakat petani sangat berkaitan erat dengan aktivitas yang sedang berlangsung di atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di atas tanah yang dimilikinya relatif tinggi, maka waktu dan tenaga serta dana yang ada di petani sebagian besar tercurah kepada kegiatan yag sedang berlangsung di atas tanah yang dimilikinya. Menurut Redfield (1985) sekelompok dari tiga sikap atau nilai dikalangan petani adalah : 1) sikap intim dan hormat terhadap tanah, 2) ide bahwa pekerjaan pertanian adalah baik, dan 3) tekanan terhadap kegiatan produktif sebagai suatu kebajikan utama, sedangkan beberapa karakteristik petani yang meliputi faktor personal yang ada pada diri individu petani seperti umur (rata-rata umur petani berusia tua), pendidikan dan pengetahuan (tingkat pendidikan formal rendah), pengalaman, luas penguasaan lahan, status kepemilikan lahan. Karakteristik-karakteristik tersebut merupakan hal yang sangat menonjol dalam tatanan kehidupan masyarakat petani. Sistem kekerabatan

dalam masyarakat petani juga sangat erat kaitanya dalam keberhasilan dalam sistem sosial yang dibentuknya.

Menurut Scott (1983), petani adalah manusia yang terikat sangat statis dalam aktivitas ekonominya. Petani dalam aktivitasnya bergantung pada norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat untuk membentuk suatu moral ekonomi. Moral ekonomi petani didasarkan atas norma subsistensi dan norma resiprositas. Petani mengalami suatu keadaan yang menurut mereka dapat merugikan kelangsungan hidupnya, maka mereka akan menjual dan menggadai harta benda mereka. Hal ini disebabkan oleh norma subsistensi. Norma resiprositas akan timbul apabila ada sebagian dari anggota masyarakat menghendaki adanya bantuan dari anggota masyarakat yang lain. Hal ini akan menyebabkan berbagai etika dan perilaku dari para petani.

Keadaan petani yang sangat tergantung pada relung ekologis sangat menentukan keadaan petani yang sangat rawan dengan batas subsistensi dan memudahkannya jatuh dalam keadaan kemiskinan. Oleh karena itu berkembangnya nilai-nilai budaya petani, sikap petani, dan moral ekonomi petani yang khas tidak dapat dilepaskan dari keadaan petani yang sangat dekat dengan rawan subsistensi di atas. Dipihak lain, Hasanudin (2010) menemukan bahwa kemiskinan petani tidak hanya disebabkan oleh penyebab relung ekologis (natural), tetapi juga oleh penyebab struktural dan kultural masyarakat petani yang bersangkutan. Selain itu, karakteristik individu petani seperti pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, kemampuan mengakses sumber ekonomi yang rendah, daya saing yang rendah, ketergantungan kepada pihak lain (patron) yang tinggi, dan produktivitas usahatani yang rendah juga merupakan sebab lain yang menyebabkan petani sangat rawan dengan kemiskinan.

2. Teori Pembangunan dan Pembangunan Pertanian

Pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan mengandung makna "pertumbuhan" dan "perubahan". Pembangunan nasional suatu negara dapat dikatakan berhasil bila angka pertumbuhan ekonominya cukup tinggi dan sekaligus membawa perubahan yang ada di masyarakat pada kondisi kehidupan yang semakin baik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan masih banyak yang kurang berhasil karena tidak mampu membawa angka pertumbuhan relatif tinggi dan juga tidak mampu membawa perubahan kondisi sosial ekonomi di masyarakat ke tingkat yang lebih baik (Soekartawi, 1995).

Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia telah dipertajam dengan arah baru pembangunan nasional. Menutut Kartasasmita (1997, dalam Sumodiningrat, 2001) arah baru pembangunan nasional yang mengutamakan pada tiga hal yaitu : 1) pemihakan dan pemberdayaan

masyarakat, 2) pemantapan otonomi dan desentralisasi melalui pendelegasian wewenang lebih luas kepada masyarakat untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, dan 3) pemantapan perubahan struktur masyarakat melalui penerapan teknologi baru yang dilakukan melalui peningkatan sosial ekonomi produktif yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Menurut Todaro (2000), proses pembangunan di masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu : pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Kedua, peningkatan taraf hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan sebagai berikut : a) penurunan tingkat ketimpangan pendapatan, b) penurunan jumlah kemiskinan, dan c) penurunan tingkat pengangguran. Ketiga ukuran keberhasilan di atas menuju satu sasaran akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti menurunnya kemiskinan. Pembangunan yang sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan masalah manusia yang menjadi pengambil keputusan. Dengan demikian, masalah manusia dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan pembangunan. Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Cara untuk membangkitkan rasa kreatif manusia tersebut harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan dilakukan dalam semua sektor pembangunan. Salah satu sektor tersebut adalah sektor pertanian. Menurut Sumodiningrat (2001), pembangunan sektor pertanian mengandung aspek mikro, makro dan global. Aspek mikro pembangunan pertanian diharapkan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani melalui pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha taninya. Aspek makro pembangunan pertanian diharapkan dapat menyediakan pangan bagi masyarakat dan menyediakan *input* bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, sedangkan dari aspek global pembangunan pertanian dapat menghasilkan devisa negara dengan tetap menjaga stabilitas produksi dan kebutuhan produk pertanian tanpa mengurangi kesejahteraan riil masyarakat petani. Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan jika terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik dengan peningkatan kesejahteraan. Sektor pertanian di Indonesia dianggap penting,

hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor (Husodo, 2009).

Tiga tugas pokok dari pembangunan pertaian yaitu : 1) mencari cara atau pola berusaha tani yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh petani, 2) mencari kegunaan dan manfaat yang lebih produktif dari usaha tani dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, dengan demikian usahatani dapat meningkatkan daya beli dari rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggota keluarganya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari, dan 3) menciptakan sumberdaya manusia *(human resources)* berupa pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi serta sumberdaya lainya seperti sarana produksi usaha tani, kredit, dan pasar. Dengan demikian, menurut Agrica (2007 dalam Irawan 2011), sasaran pembangunan pertanian tidak saja dititikberatkan pada peningkatan produksi, namun juga mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan taraf hidup petani, perluasan lapangan kerja, bahkan jika memungkinkan juga bertujuan untuk memperluas pasar produk pertanian, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemampuan sektor pertanian untuk memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani tergantung pada tingkat pendapatan usahatani dan surplus yang dihasilkan oleh sektor itu sendiri. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan usahatani, disamping merupakan penentu utama kesejahteraan masyarakat petani, juga muncul sebagai salah satu faktor penting yang mengkondisikan pertumbuhan ekonomi.

3. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaan, maka Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Untuk Pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian tersebut, maka Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah menetapkan program jangka menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. PUAP merupakan

bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oieh petani. Program PUAP tersebut memiliki 4 tujuan yaitu : 1) Mengurangi kemiskinan dan penganguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, 2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani, 3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, dan 4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Indikator keberhasilan *output* Program PUAP yaitu : tersalurkannya dana BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian. Indikator keberhasilan *outcome* Program PUAP antara lain : 1) Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani angota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani, 2) Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) diperdesaan, dan 3) Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah, sedangkan Indikator *benefit* Program PUAP antara lain : 1) Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP, 2) Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Sasaran yang ingin dicapai meliputi : 1) Berkembangnya usaha agribisnis di desa-desa miskin atau tertinggal, 2) Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani, 3) Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, dan 4) Berkembangnya usaha pelaku agribisnis di desa-desa lokasi program.

Pelaksanaan penyaluran dana BLM-PUAP dilakukan melalui gapoktan. Namun hal ini bukan berarti bahwa dana tersebut ditujukan untuk gapoktan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan organisasi gapoktan. Dana tersebut tetap harus disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan rumah tangga sasaran program PUAP. Oleh karena itu gapoktan hanya berperan sebagai pengelola dana BLM-PUAP yang menyalurkan dana tersebut kepada RTM dan mengendalikan pemanfaatannya yaitu untuk usaha agribisnis. Secara garis besar kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan PUAP dapat digambarkan sebagai berikut :

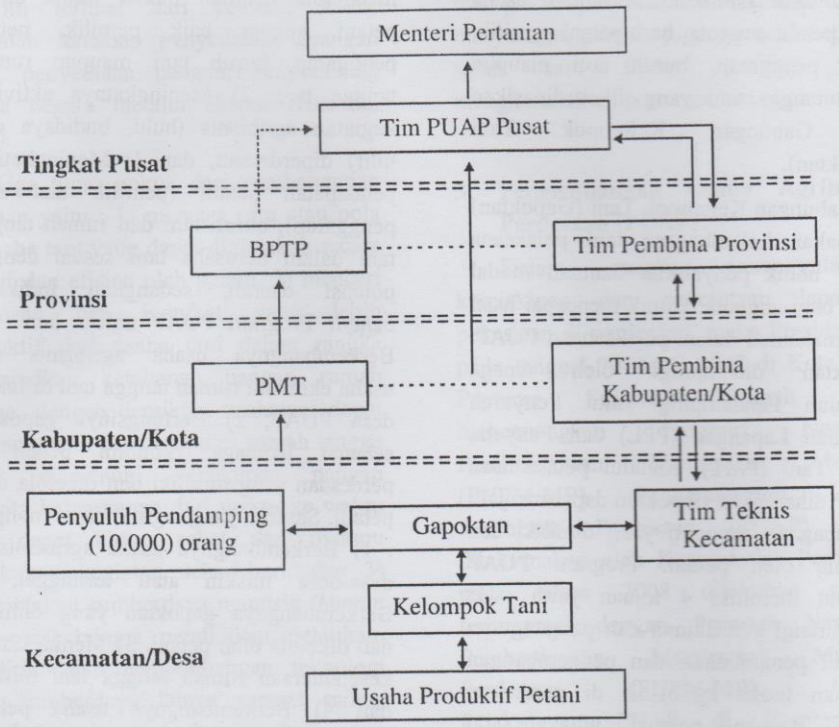

Gambar 1. Struktur Pembinaan dan pengendalian PUAP (Kementerian Pertanian, 2008)

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi, Waktu, dan Responden Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*), yaitu Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan bahwa Desa tersebut merupakan daerah yang penduduknya miskin dan sejak tahun 2008 telah mendapatkan program PUAP dari pemerintah. Petani yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah petani penerima dana program PUAP dan dipilih dengan menggunakan metode alokasi *proporsional random sampling* yaitu sebanyak 56 orang petani dari 125 petani penerima dana program PUAP. Penelitian dilaksanakan dari bulan September sampai dengan Desember 2011.

2. Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan dan analisis data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dan didukung dengan wawancara mendalam (*Depth Interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang

diperoleh dianalisis secara deskriptif dan menggunakan statistik non parametrik Korelasi Rank- Spearman.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah seluas 17.027,86 hektar dengan jumlah penduduk 17.125 jiwa dan terdiri dari 3.385 KK. Jarak Desa Sukadana ke Ibu Kota Kecamatan Sukadana berjarak 250 meter, jarak Desa Sukadana ke Ibu kota Kabupaten Lampung Timur berjarak 5 km, dan jarak Desa Sukadana ke Ibu kota Provinsi berjarak ±70 km. Desa Sukadana merupakan daerah yang memiliki topografi dataran sedang, terletak kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 27 – 31^{0}C dan curah hujan rata-rata 500 mm/tahun. Kondisi tanah yang subur di desa ini cocok untuk mengembangkan budidaya padi, jagung, singkong dan tanaman perkebunan.

Penggunaan lahan di Desa Sukadana meliputi untuk tempat pekarangan/perumahan (19.50%), perladangan/tegalan (37,50 %), persawahan 8,40%), dan perkebunan rakyat (34,40%), dan lain-lain (0,20%). Luasnya lahan yang digunakan dalam sektor pertanian di desa ini menunjukkan bahwa Desa Sukadana memiliki potensi untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian. Usahatani yang dikembangkan pada sektor pertanian di Desa Sukadana adalah usahatani jagung, singkong, dan padi. Dilihat dari komposisi umur penduduk Desa Sukadana, maka sebagian besar (lebih dari 65 %) penduduk Desa Sukadana termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun). Banyaknya usia produktif di desa ini merupakan modal sumberdaya manusia yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam proses pembangunan berkelanjutan dan dapat dijadikan modal pula dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di desa tersebut.

2. Keadaan Umum Responden

Umur responden penelitian berkisar antara 29 – 65 tahun, dengan rata-rata umur responden adalah 45 tahun. Tingkat pendidikan formal yang pernah dicapai oleh responden adalah SD (41,00%), SMP (39,35%), dan SMA (19,65%). Jenis usaha yang dilakukan responden tidak terbatas hanya berusahatani padi sawah, tetapi juga berkebun (perkebunan rakyat), berdagang sayuran, dan melakukan industri rumahtangga (pembuatan gula merah).

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Program PUAP

Dalam hal tingkat pengetahuan tentang program PUAP (tujuan program, sasaran program, sosialisasi program, dan sumber dana program, maka tingkat pengetahuan responden tentang hal ini termasuk dalam klasifikasi sedang sampai tinggi, begitu pula dalam hal tingkat pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pelaksanaan program PUAP. Dana program PUAP yang disalurkan ke petani berjumlah Rp. 100.000.000,- untuk 120 petani anggota

gapoktan. Besarnya pinjaman per petani berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan petani tidak dikenakan agunan/jaminan dalam pinjaman dana PUAP tersebut. Sebelum mendapatkan modal dari program PUAP, banyak dari masyarakat petani di Desa Sukadana mengeluh mengenai tidak adanya pinjaman dana atau modal untuk membantu usaha agribisnis produktif di Desa Sukadana.

Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program PUAP ini meliputi kemudahan petani dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian, kemudahan petani dalam pemasaran hasil produksi pertanian, dan tersedianya saran dan prasarana penunjang produksi pertanian seperti perbaikan saluran irigasi, tersedianya akses jalan yang baik, dan tersedianya pasar. Dukungan pemerintah dalam program PUAP dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, BP4K, BP3K, dan gapoktan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

Selain berusahatani padi sawah, maka petani penerima dana program PUAP di Desa Sukadana juga memiliki jenis usaha lain. Jumlah petani responden yang menggunakan dana PUAP untuk berbagai jenis usaha tersebut adalah usahatani padi sawah (12 orang), usahatani padi lahan kering (8 orang), usahatani jagung (7 orang), industri rumah tangga gula merah (22 orang), pedagang sayuran keliling (7 orang).

Partisipasi petani dalam program PUAP seperti keikutsertaan dalam perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan menikmati hasil kegiatan termasuk dalam klasifikasi sedang. Ditinjau dari tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan program PUAP di desa ini, maka pelaksanaan program PUAP di desa tersebut termasuk dalam klasifikasi cukup berhasil.

4. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Tingkat Keberhasilan Program PUAP

Keberhasilam program PUAP dilihat berdasarkan beberapa indikator yaitu: 1) indikator keberhasilan *output* (tersalurkannya dana PUAP), 2) indikator keberhasilan *outcome* (peningkatan kemampuan gapoktan, peningkatan aktivitas agribisnis, pendapatan petani, dan perkembangan modal PUAP), dan 3) indikator keberhasilan *benefit* (perkembangan usaha agribisnis dan fungsi gapoktan sebagai lembaga ekonomi). Berdasarkan ketiga indikator di atas, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUAP di Desa Sukadana termasuk cukup berhasil. Rincian pencapaian ketiga indikator keberhasilan program PUAP tampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program PUAP di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, 2011

No	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	*Output:*	
	Kesesuaian dana PUAP	Cukup sesuai
	Waktu penyaluran dana PUAP oleh gapoktan	Sesuai
	Ketepatan penyaluran dana PUAP ke petani	Sesuai
2	*Outcome*:	
	a. Peningkatan Kemampuan Gapoktan:	
	Fasilitas yang diberikan gapoktan	Cukup banyak
	Kemampuan gapoktan untuk memfasilitasi program PUAP	Tinggi
	Fasilitas dan pengelolaan dana PUAP dalam membantu kelancaran peminjaman dan pengembalian dana ke gapoktan	Cukup baik
	b. Peningkatan Aktivitas Usaha Agribisnis	
	Aktivitas kegiatan usaha agribisnis	Cukup banyak
	Interaksi antar petani dalam usaha agribisnis	Tinggi
	Curahan waktu dalam usaha agribisnis	Cukup banyak
	c. Pendapatan Petani setelah menerima Program PUAP	Bertambah (berkisar antara Rp. 1-3 Juta/bulan)
	d. Perkembangan Modal	
	Perkembangan Modal PUAP untuk usaha agribisnis	Cukup berkembang
	Pertambahan Dana PUAP yang dipinjam	Tinggi
	Perkembangan dana PUAP yang dipinjam	Tinggi (berkisar antara 4,6 - 6,9 % per periode(4-12 bulan)
3	*Benefit:*	
	Perkembangan usaha agribisnis	Cukup berkembang
	Fungsi gapoktan sebagai lembaga ekonomi	Cukup berfungsi

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa pelaksanaan program PUAP di pedesaan selain telah dapat meningkatkan pendapatan petani (berkisar antara Rp.1-3

Juta/bulan), juga telah mampu meningkatkan interaksi sosial antara petani. Selain itu jika dilihat dari aspek perkembangan modal dan usaha agribisnis, maka pelaksanaan program PUAP di pedesaan juga telah mampu menjadi sumber ekonomi baru yang cukup menjanjikan bagi masyarakat petani di pedesaan. Namun demikian, pemberian pinjaman dana melalui Program PUAP yang belum menyentuh seluruh petani ternyata telah menimbulkan kecemburuan sebagian petani yang lain yang tidak mendapat bantuan pinjaman dana tersebut.

Dilihat dari dampak yang telah ditimbulkan dari pelaksanaan program PUAP di pedesaan tampak bahwa pelaksanaan program PUAP telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial yang terjadi pada masyarakat petani penerima PUAP tampak dari meningkatnya interaksi antar petani penerima PUAP, solidaritas antar petani penerima PUAP, semangat untuk berhasil dalam usaha agribisnisnya, tanggung jawab petani penerima PUAP untuk pengembalian dana PUAP ke gapoktan, dan waktu/tempo terjadinya dampak sosial. Dampak sosial seperti ini merupakan hal yang positif bagi perkembangan dan kehidupan masyarakat petani. Di pihak lain, walaupun ada sebagian petani tidak mendapat bantuan pinjaman dana melalui program PUAP, namun mereka tetap mendukung pelaksanaan program PUAP dan meyakini bahwa di lain kesempatan mereka pun akan menerima bantuan dana pinjaman melalui program PUAP tersebut untuk usaha agribisnisnya. Dampak ekonomi program PUAP adalah meningkatnya aktivitas dan jenis usaha agribisnis serta pendapatan petani, sedangkan dampak lingkungan dari program PUAP adalah terdapatnya peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan lahan untuk usaha agribisnis. Selain itu, keberadaan program PUAP telah meningkatkan keberdayaan masyarakat petani dalam hal kemampuan petani mengakses sumber-sumber ekonomi baru, meningkatnya partisipasi petani, kerjasama antara petani, dan kemampuan untuk memupuk modal yang diperoleh. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tampak bahwa besarnya jumlah dana yang dipinjamkan melalui program PUAP masih sangat dirasakan kurang untuk pengembangan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani. Begitu pula frekuensi pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan dalam pelaksanaan program PUAP masih perlu ditingkatkan.

Keberhasilan pelaksanaan program PUAP di Desa Sukadana tidak terlepas dari beberapa faktor antara lain tingkat pengetahuan petani tentang program PUAP itu sendiri, peranan penyuluh pertanian lapangan dalam mendampingi aktivitas petani melakukan usaha agribisnisnya, dukungan pemerintah, dan partisipasi petani dalam pelaksanaan program PUAP. Hubungan beberapa faktor di atas dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan Program PUAP di Desa Sukadana dengan menggunakan program SPSS tampak pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program PUAP di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, 2011

Variabel X	Variabel Y	Rs	t- hitung	t-tabel	Nilai Signifikansi
X1 : Tingkat pengetahuan Petani tentang program PUAP	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program PUAP	0,384	3,064**	2,407	0,002**
X2 : Tingkat aktivitas pendampingan program PUAP		0,318	2,464**	2,407	0,009**
X3 : Tingkat pengelolaan dana PUAP		0,229	1,728*	1,675	0,045*
X4 : Tingkat dukungan pemerintah		0,302	2,327*	1,675	0,012*
X5 : Banyaknya jenis Usaha petani penerima program PUAP		0,306	2,361*	1,675	0,011*
X6 : Tingkat partisipasi petani penerima PUAP		0,324	2,516**	2,407	0,007**

Keterangan :

Rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman

* = Berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 95% (α= 0,05)

** = Berhubungan sangat nyata pada taraf kepercayaan 99% (α = 0,01)

Berdasarkan Tabel 4 tampak bahwa seluruh peubah yang diteliti memiliki hubungan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUAP di Desa Sukadana. Namun jika dilihat dari besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh, maka tampak bahwa tingkat pengetahuan petani tentang program PUAP, tingkat aktivitas pendampingan dalam pelaksanaan program PUAP, dan tingkat partisipasi petani dalam program PUAP memiliki korelasi yang sangat nyata dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUAP tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini tampak bahwa sosialisasi program, pendampingan dalam pelaksanaan program, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menyebarluaskan suatu program sebagai inovasi baru dalam mengadakan perubahan perubahan ditengah-tengah masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan program PUAP di desa penelitian termasuk dalam klasifikasi cukup berhasil, (2) Faktor-faktor yang paling berhubungan dengan keberhasilan program PUAP adalah berturut-turut yaitu tingkat pengetahuan petani tentang program PUAP, tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program PUAP, tingkat aktivitas pendampingan program PUAP, banyaknya jenis usaha petani, tingkat dukungan pemerintah, dan tingkat pengelolaan dana PUAP, dan (3) Dampak sosial program PUAP adalah meningkatnya interaksi sosial dan solidaritas antar petani, semangat dan tanggungjawab petani dalam usaha agribisnis, serta timbulnya kecemburuan petani lain terhadap petani penerima program PUAP. Dampak ekonomi program PUAP adalah meningkatnya aktivitas dan jenis usaha agribisnis serta pendapatan petani, sedangkan dampak lingkungan dari program PUAP adalah terdapatnya peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan lahan untuk usaha agribisnis. Keberadaan program PUAP telah meningkatkan keberdayaan masyarakat petani dalam hal kemampuan petani mengakses sumber-sumber ekonomi baru, meningkatkan pengembangan usaha agribisnis yang dilakukan petani, meningkatkan partisipasi petani dalam pelaksanaan program, kerjasama antara petani, dan kemampuan petani untuk memupuk modal yang diperoleh untuk pengembangan usaha yang dilakukan.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PUAP di pedesaan hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Aktivitas pendampingan kepada petani dalam pelaksanaan program PUAP ditingkatkan, 2) Jumlah dana pinjaman yang disalurkan melalui program PUAP diperbesar dan diperluas kepada petani dalam jumlah yang lebih banyak, dan 3) Besarnya jumlah dana pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani, dan 4) Pemberian wawasan yang lebih luas tentang usaha agribisnis ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2009. *Lampung dalam Angka Tahun 2009*. Bandar Lampung.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. 2011. *Penerima PUAP di Kabupaten Lampung Timur*. Bandar Lampung.

Hernanto, F. 1994. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Husodo. 2009. *Pertanian Mandiri*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Kartasasmita, G. 1997. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Cidesino. Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2008. *Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2008.* http://database.deptan.go.id/PUAP/tampil.php?page=pedum. Diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.

Redfield, Robert. 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Terjemahan Daniel Dhakidae. CV Rajawali. Jakarta.

Scott, James C. 1976. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Substansi di Asia Tenggara*. Terjemahan YIIS . CV Rajawali. Jakarta.

Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Rajawali Press. Jakarta.

Sumodiningrat, G. 2001. *Swasembada Pangan*. Rbi Jakarta. Jakarta.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.

Wolf, E. J. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Terjemahan YIIS. CV Rajawali. Jakarta.